

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



Penyerahan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK serta Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2019

Pontianak (11/07/19) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK serta Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2019 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini mengundang segenap pemerintah daerah di Kalimantan Barat, baik Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan Inspektur. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono.

Laporan yang diserahkan merupakan hasil atas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta penyelesaian kerugian Negara/Daerah pada 15 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal pemantauan tindak lanjut, pada Semester I Tahun 2019, atas 4.592 temuan pemeriksaan senilai Rp984.410.335.428,00 telah dihasilkan 10.774 rekomendasi senilai Rp536.380.230.934,00. Atas rekomendasi tersebut, sebanyak 8.472 rekomendasi (78,63%) telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan telah sesuai dengan rekomendasi sedangkan atas 65 rekomendasi (0,65%) tidak dapat ditindaklanjuti. Nilai aset yang telah dikembalikan adalah Rp251.705.203.584,68.

Selain laporan atas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan Kalimantan Barat juga menerbitkan laporan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah. Dari hasil pemantauan ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan, antara lain dalam hal kurang aktifnya upaya penanganan kerugian daerah, lemahnya monitoring dan lemahnya regulasi atau pedoman. Kurang aktifnya upaya penanganan tersebut menyebabkan penanganan menjadi tidak kunjung terselesaikan. Atas permasalahan ini, BPK Kalbar menyarankan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih aktif, merevisi aturan yang tidak sesuai dengan payung hukum yang ada, dan meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk memonitor penanganan kerugian daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan dan berharap agar Pemerintah Daerah berperan aktif dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR